



# Usut Bansos Terindikasi Menyimpang

DUMAI (RP) - Aparat penegak hukum diminta melakukan pengecekan dan mengusut pengelolaan kegiatan yang dibiayai dana bantuan sosial (Bansos) di berbagai SKPD Pemko Dumai. Pasalnya, ada indikasi terjadi penyimpangan dari ketentuan pengelolaan Bansos yang didapat melalui penunjukan langsung (PL).

"Adanya indikasi penyimpangan pengelolaan dana Bansos bersumber dari APBD Dumai," ungkap Ketua Forum Komunikasi Kebijakan LKKMD Kota Dumai H Zulkifli Ahad SSos. Hal ini karena pengelolaannya tidak semestinya langsung dikerjakan melalui PL kepada pihak tertentu seperti anggota DPRD, tetapi berikan kepada kalangan pengusaha.

"Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pengecekan terhadap kegiatan dibiayai dana Bansos APBD. Karena pengelolaannya langsung bulat-bulat dikerjakan, bukannya diserahkan kepala kalangan pengusaha, tapi langsung diambil alih seperti oleh anggota DPRD," bebarnya.

Kegiatan Bansos, lanjutnya, tersebar di berbagai SKPD di lingkungan Pemko Dumai dikerjakan dengan penunjukan secara langsung (PL). Bahkan, keseluruhannya diambil alih. Akibatnya, kalangan pengusaha tidak kebagian kegiatan.

Bansos yang terindikasi menyimpang, rincinya, pengelolaan Bansos 2012, 2013, sampai 2014 ini. (ery/rpg)